MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

UU Anti Pendanaan Terorisme

UU | Nomor 9/2013 | Tahun 2013

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

✓ Berlaku

Berlaku sejak 13 Maret 2013

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur pidana pendanaan terorisme serta kewajiban bank: kenali nasabah, lapor TKM ke PPATK, dan blokir dana orang dalam DTTOT.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 9/2013 melengkapi rezim APU-PPT. Bank sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) wajib mencegah dananya dipakai untuk terorisme.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: APU-PPT, DTTOT

Berlaku sejak 13 Maret 2013

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana untuk terorisme diancam penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

   Pasal 4 Sumber: peraturan.go.id

2. PJK wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, termasuk yang terkait pendanaan terorisme.

   Pasal 12 Sumber: peraturan.go.id

3. PJK wajib lapor TKM terkait pendanaan terorisme ke PPATK paling lama 3 hari kerja; sengaja melanggar didenda maks. Rp1 miliar.

   Pasal 13 Sumber: peraturan.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) dikeluarkan Kapolri berdasarkan penetapan PN Jakarta Pusat.

Pasal 27 Sumber: peraturan.go.id

5 PJK wajib memblokir serta merta semua dana milik orang/korporasi dalam DTTOT, membuat berita acara, dan mengirimnya ke Kapolri.

Pasal 28 Sumber: peraturan.go.id

6 Pemblokiran berlaku selama nama masih tercantum di DTTOT; keberatan diajukan ke Kapolri.

Pasal 28 dan 29 Sumber: peraturan.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Cocokkan data nasabah dengan DTTOT terbaru, saat pembukaan rekening dan berkala.
- Blokir serta merta dana nasabah yang cocok dengan DTTOT dan buat berita acara.
- Laporkan TKM terkait pendanaan terorisme ke PPATK paling lama 3 hari kerja.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Customer Service

Cek nama calon nasabah dengan DTTOT sebelum rekening dibuka.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Kelola pembaruan DTTOT, jalankan pemblokiran, dan kirim berita acara serta laporan TKM.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji berkala bahwa penyaringan DTTOT dan pemblokiran berjalan sesuai UU.

KAMUS KECIL

Istilah penting

DTTOT

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

Pemblokiran serta merta

Pembekuan dana seketika, tanpa menunggu proses lain.

PJK

Penyedia Jasa Keuangan, termasuk BPR/BPRS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nama nasabah cocok dengan DTTOT. Apa langkah bank?

JAWABAN

Blokir serta merta seluruh dananya, buat berita acara, dan kirim ke Kapolri.

TANYA 2

Berapa lama batas laporan TKM terkait pendanaan terorisme?

JAWABAN

Paling lama 3 hari kerja sejak diketahui.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; diundangkan 13-03-2013.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- URL katalog (jdih.ppatk.go.id) menolak koneksi saat dicek 17-11-2026; naskah dibaca dari peraturan.go.id (Lembaran Negara 2013 No. 50).
- Batas waktu teknis pemblokiran dan penyampaian berita acara diatur ketentuan pelaksana (peraturan bersama/OJK), belum dibuka.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/id/uu-no-9-tahun-2013

peraturan.go.id
https://peraturan.go.id/files/uu9-2013bt.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/3/undang-undang-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pendanaan-terorisme

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.